KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Hargai Guru untuk Perbaiki Mutu Pendidikan
Tanggal : Selasa, 05 Mei 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

Hargai Guru untuk Perbaiki Mutu Pendidikan

Guru yang berkualitas menjadi jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Masih banyak guru yang hidupnya jauh dari sejahtera.

JAKARTA, KOMPAS — Keberpihakan terhadap kondisi guru sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Saat ini masih banyak ditemukan guru honorer di daerah pelosok dengan gaji Rp 300.000 per bulan.

Dukungan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan guru lewat sertifikasi juga terbatas. Selama 2017-2024, alokasi tunjangan profesi guru berkisar Rp 50 triliun hingga Rp 55 triliun per tahun.

"Pemerintah seharusnya yakin bahwa guru berkualitas dan sejahtera dapat membawa perubahan untuk bangsa melalui ruang-ruang kelas," kata Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI) Abdul Wahid Nara, saat dihubungi dari Jakarta, Senin (4/5/2026).

Sementara itu, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Senin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyampaikan, pemerintah berusaha mendorong tercapainya mutu pendidikan, di antaranya menggunakan pendekatan partisipasi semesta. Selain ekosistem pendidikan di sekolah, proses ini juga melibatkan semua pihak, seperti keluarga, masyarakat, dan juga media.

Ia menuturkan, pembangunan kualitas pendidikan di Indonesia memerlukan waktu. "Jadi, semuanya harus bersabar karena, misalnya terkait dengan kemampuan belajar anak-anak kita, kita ini, kan, masih terdampak oleh apa yang sering disebut dengan *learning loss* atau *learning poverty*. Itu masih menjadi masalah yang residunya masih terasa sampai sekarang," ucap Mu'ti.

>> BACA JUGA:

Pendidikan yang Hadir untuk Sesama
Sekolah informal menjadi ruang belajar inklusif yang mewadahi dan menumbuhkan semangat kesetaraan bagi siapa saja. KOMPAS.ID

komp.as/untuksesama

Anggaran pendidikan

Wahid menuturkan, ada perasaan sedih dan marah di kalangan guru pada ketidakadilan alokasi anggaran pendidikan.

Dari anggaran untuk pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, sebesar Rp 757,8 triliun, sebanyak Rp 274,7 triliun untuk gaji serta kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga pendidik. Namun, dari anggaran pendidikan itu, ada yang digunakan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kami para guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran saja tidak mudah mendapat dukungan pendidikan dan

(Bersambung ke hlm 15 kol 3-7)

KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Hargai Guru untuk Perbaiki Mutu Pendidikan

(Sambungan dari halaman 1)

pelatihan. Di IGI, kami para guru berupaya mandiri untuk bisa belajar dari para ahli atau guru lain agar proses belajar di kelas bisa makin baik," kata Wahid, pengajar di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan.

Anggaran pendidikan yang belum sepenuhnya berpihak kepada guru, antara lain, terlihat dari belum adanya guru profesional untuk melayani 13 siswa di kelas jauh Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanjung Raja, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Lampung. Para siswa itu tinggal di daerah pelosok, dekat hutan.

Kepala SD Negeri 1 Tanjung Raja Iryani mengatakan, demi memastikan pembelajaran tetap berjalan, warga setempat direkrut untuk menjadi guru honorer dengan syarat bisa membaca dan menulis serta punya pengalaman mengajar siswa. Guru honorer ini digaji Rp 300.000-Rp 350.000 per bulan dari sisa dana operasional sekolah.

Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru Satriwan Salim menyampaikan, selama 2017-2024, besaran alokasi tunjangan profesi guru berkisar Rp 50 triliun hingga Rp 55 triliun per tahun.

Baru pada 2025 ada penambahan signifikan menjadi Rp 70,6 triliun dan pada tahun 2026 senilai Rp 74,76 triliun. "Kemajuan itu patut kita syukuri dan apresiasi," kata Satriwan.

Kondisi dosen

Sementara di kalangan dosen, Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengungkapkan, sekitar 42,9 persen dosen menerima pendapatan tetap di bawah Rp 3 juta per bulan. Bahkan, di perguruan tinggi swasta (PTS) ada dosen yang hanya mendapat upah di bawah Rp 900.000 per bulan.

"Ini membuktikan penghasilan dosen di Indonesia teramat miris. Gaji pokok dosen rata-rata hanya mampu membeli 143 kilogram beras," kata Ketua Umum SPK Dhia Al Uyun.

"Sertifikasi dosen untuk mendapatkan tunjangan profesi minim kuota. Selain itu, tunjangan tersebut juga sering kali dipersulit lewat serangkaian seleksi birokratis dan dapat dicabut sepihak akibat kegagalan administratif, seperti pada sistem beban kerja dosen," ucap Dhia.

Menurut Ketua Umum Aliansi Dosen Akademik dan Kevokasian Seluruh Indonesia (ADAKSI) Anggun Gunawan, nasib dosen, bahkan yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), jauh dari perhatian serius negara. Tunjangan fungsional dosen sejak 2007 tak pernah naik, rapelan tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN periode 2020-2024 belum dibayarkan, dan tukin untuk semua (tukin *for all*) dosen ASN sebagai hak dasar makin buram.

"Dosen memikul Tri Dharma dan tugas penunjang dengan beban lebih yang melimpah dan tak berkesudahan, sementara kesejahteraan terabaikan dan tanpa kejelasan," kata Anggun.

Ketua Komisi X DPR Hetifah mengatakan, dalam alokasi anggaran pendidikan untuk kesejahteraan serta mutu guru dan dosen, persoalannya bukan di besar-kecilnya angka, melainkan di struktur, birokrasi, dan *political will*.

Menurut Hetifah, anggaran untuk guru dan dosen terlihat ada peningkatan. Persoalannya, sebagian besar dari uang ini sudah terikat untuk belanja rutin (gaji pokok, tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah khusus, dan sebagainya). "Bukan uang segar yang bisa 'didaur ulang' untuk naikkan gaji guru dan dosen secara merata," ucapnya.

Lebih lanjut Hetifah mengatakan, menghargai guru seharusnya menjadi pilihan politik. Namun, ada kerumitan dalam struktur guru karena guru terpecah dalam banyak klasifikasi dengan hak berbeda. Prioritas anggaran juga cenderung masih mengutamakan untuk program non-pendidikan.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menjelaskan, peningkatan mutu dan kesejahteraan guru selalu menjadi prioritas pemerintah. Salah satunya melalui penetapan arah kebijakan strategis tahun 2026. Hal ini mencakup peningkatan kualifikasi akademik guru, penguatan kompetensi berbasis praktik pembelajaran, dan integrasi teknologi dalam proses belajar-mengajar.

Tata kelola guru ke depan juga akan dibangun dalam satu siklus utuh yang mencakup perekrutan, pengembangan, kinerja, kesejahteraan, hingga karier. Pendekatan ini untuk menciptakan sistem yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi profesi guru.

(ELN/FRN/TIO/VIO)